

## Kapolda Jatim: Kasus Marsinah Ada yang Mempolitisir

SURABAYA, REPUBLIKA

Kapolda Jawa Timur, Mayjen (Pol.) Ermon Rifai Argomana, mengatakan, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mempolitisasi kasus kematian Marsinah, yang hingga saat ini masih misterius. "Tujuannya, untuk mempengaruhi opini masyarakat, seolah kematian Marsinah itu memang ada kaitannya dengan masalah politis," kata Ermon menjawab pertanyaan wartawan di sela acara pembukaan Surabaya Expo 1993 oleh Wapres Try Sutrisno, Jumat (13/8).

Pernyataan Ermon ini berkaitan dengan dilarangnya *Pameran Seni Rupa Instalasi untuk Marsinah* di Dewan Kesenian Surabaya, Kamis lalu (*Republika*, 13/8). "Jelas ada pihak-pihak tertentu yang mendorong persoalan ini menjadi persoalan politis, dan mengajak masyarakat untuk memiliki opini begitu. Saya belum bisa sebut siapa. Tapi, jelas ada pihak yang sengaja berniat seperti itu," papar Kapolda.

Pihak-pihak tersebut sengaja menupatkan opini seolah kematian Marsinah disebabkan oleh perannya sebagai buruh yang mengalag rekam-rekornya di PT AMC untuk berunjuk-rasa. Padahal, kata Kapolda, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan kematiannya ada kaitan dengan unjuk rasa sebelumnya. "Sampai saat ini kita belum tahu pucuk, kaitan kematiannya dengan unjuk rasa itu. Kita belum tahu siapa peris. Kalau sudah terungkap nanti, baru kita tahu ada kaitannya atau tidak," tandasnya.

Menonjolkan kaitan politis

Menurut Ermon polisi membatalakan pameran itu, karena menganggap pameran itu sengaja menonjolkan kaitan politis kematian Marsinah. "Padahal, orang mati terbunuh, kan, banyak. Mengapa itu yang harus ditonjolkan. Apalagi yang ditonjolkan itu sesuatu yang belum tentu benar," ujarnya bersenangat. Hal itu, katanya, justru akan menimbulkan persoalan baru. Yakni, terciptanya polemik.

Yang dikehendaki Polisi, katanya, adalah bagaimana bersama-sama dengan masyarakat bisa mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan tersebut. "Mari diam-diam cari informasi siapa pelakunya, berikan kepada kita yang berwenang memproses. Bukan dengan menonjol-njolkan sesuatu yang belum tentu benar. Keperluannya apa? Arti pentingnya dalam rangka mengungkap kasus ini apa?" kata Ermon selanjutnya.

Kegiatan seperti itu, katanya, yang pasti tidak akan membentuk opini yang betul. Karena itu, kalau pemria mengajukan izin, Polisi tidak akan mengabulkannya. "Kami, jika keberatan. Sesuatu yang belum tentu benar dibesar-besarkan. Cobalah dipikirkan, apa maksudnya, apa tujuannya? Ada dua keberatan, sehingga pameran itu kami batalkan. Yang jelas, tidak ada izin. Kedua, apa, sih, kegunaannya, kelihatan tidak ada yang positif."

Kalau memang maksudnya untuk membina solidaritas sosial, kata Kapolda, banyak hal bisa dilakukan, bukan hanya dengan

membesar-besarkan kasus Marsinah. Bersama-sama menanggulangi kemiskinan, katanya, jelas lebih konkret untuk menunjukkan solidaritas sosial. Sementara pameran itu, bukan malah melahirkan solidaritas, tapi mengubah masyarakat untuk memiliki opini yang belum tentu betul.

Ditemui di tempat yang sama, Pangdam V Brawijaya Mayjen (TNI) Hatis Sudarmo mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan tentang pembatalan pameran itu. "Semua masalah memang tidak harus dilaporkan kepada saya. Karenanya, saya tak mau berkomentar," katanya.

Salah seorang Ketua Presidium DKS, Sam Abdo Parono, Senin mendatang (16/8), merencanakan akan menghadap Kapolda Habes Surabaya, untuk memperoleh penjelasan tentang masalah ini, sekaligus membarikatkan kemungkaman diizinkan DKS mengadakan kembali acara tersebut. "Saya jamin, pameran itu tidak akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Saya berniat menjadi penjaminnya. Kalau tetap dilarang, berarti bukan karena persoalan izin."

Sementara itu, kemarin, di Jakarta, Front Indonesia untuk Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia (INTIGIT) lewat Koordinatornya, Saleh Abdullah mengeluarkan siaran pers yang mengancam tindakan polisi tersebut. Menurut Saleh tindakan itu akan menggarang simpati nasional maupun internasional terhadap aparat keamanan. ■ (nm)